



## Kebijakan Pemerintah terkait Pengelolaan Kurikulum dalam Menciptakan Sekolah Unggul

Anggita Lestari<sup>1</sup>, Gibran Andika Pratama<sup>2</sup>, Giska Aryola<sup>3</sup>,  
M.Irdan Jundi Arrosyid<sup>4</sup>, Osey David Hidayat<sup>5</sup>, Bahtiyar Heru Susanto<sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP, Universitas PGRI Yogyakarta  
Email: [anggitallestari2602@gmail.com](mailto:anggitallestari2602@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received May 25, 2024

Revised May 29, 2024

Accepted June 12, 2024

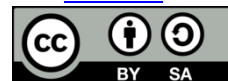
#### Keywords:

Education, Curriculum Management, Government Policy.

### ABSTRACT

*The curriculum is a comprehensive program tool that reflects the quality of a country's education and has a strategic role in national development. Therefore, systematic and professional efforts are needed to manage the curriculum in a dynamic and integrated manner, taking into account all aspects related to achieving national education goals. The purpose of this article is to examine the contents of the curriculum, problems with Curriculum Management and government policies in managing the curriculum to create superior schools. The results of this research show that government policy in managing the curriculum is funding the curriculum, facilitating the presence of educators and education personnel for the curriculum, developing a curriculum based on local wisdom, and teacher policies for implementing the curriculum. The study in this article provides readers with insight into recognizing government policies in managing the curriculum to create superior schools. This information is about government policies implemented for curriculum management as well as curriculum problems which can be a source of inspiration for developing curriculum management to make it even better*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### Article Info

#### Article history:

Received May 25, 2024

Revised May 29, 2024

Accepted June 02, 2024

#### Keywords:

Pendidikan, Pengelolaan Kurikulum, Kebijakan Pemerintah.

### ABSTRACT

Kurikulum merupakan perangkat program yang menyeluruh dengan mencerminkan mutu pendidikan suatu negara dan memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan profesional dalam mengelola kurikulum secara dinamis dan terpadu, dengan mempertimbangkan semua aspek yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk menelaah isi-isi dalam kurikulum, permasalahan Pengelolaan Kurikulum dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kurikulum untuk menciptakan sekolah yang unggul. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kurikulum yaitu dengan pendanaan kurikulum, Memfasilitasi adanya pendidik dan tenaga kependidikan untuk kurikulum, Pengembangan Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal, dan



---

Kebijakan Guru Untuk Menerapkan Kurikulum. Kajian pada artikel ini memberikan wawasan kepada pembaca untuk mengenali kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kurikulum untuk menciptakan sekolah yang unggul. Informasi ini mengenai kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk pengelolaan kurikulum serta permasalahan kurikulum yang bisa menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan pengelolaan kurikulum agar menjadi lebih baik lagi.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

**Corresponding Author:**

Anggita Lestari

Universitas PGRI Yogyakarta

Email: [anggitallestari2602@gmail.com](mailto:anggitallestari2602@gmail.com)

---

## **Pendahuluan**

Kurikulum didalam dunia pendidikan ialah hal yang sangat penting, sebagaimana kurikulum sebagai titik tumpu dalam terlaksananya proses pembelajaran. Kurikulum merupakan sistem rencana dan pengaturan yang bertujuan mengenai proses pembelajaran dan dapat menunjang proses keberhasilan satuan pendidikan. Kurikulum pada umumnya adalah rancangan yang memuat seperangkat mata pelajaran dan materi yang akan dipelajari, atau yang akan diajarkan guru kepada siswa (Zainuri,2018). Tanpa adanya kurikulum proses belajar dan mengajar akan terhambat dan tidak akan berjalan.

Kurikulum yang ada saat ini masih merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang berbasis kompetensi. Kurikulum pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kemajuan pendidikan suatu negara, mulai dari konsep hingga penerapan atau praktik. Karena mempunyai peranan dalam pelaksanaan pedoman pendidikan yang baik seperti perencanaan dan pengorganisasian isi dan materi pembelajaran. Sejak Kurikulum 1947 hingga kemerdekaan Indonesia, kurikulum mengalami perubahan dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebanyak 11 kali Kurikulum Indonesia dikembangkan pada tahun 1947, 1952, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013 dan merdeka yang masih digunakan sampai saat ini.

Namun berdasarkan hasil survei *Program for International Student Assessment (PISA)* terbaru yang dipublikasikan pada Desember 2019, Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara. Berdasarkan data tersebut, Indonesia menempati peringkat keenam terbawah, masih



tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Kajian PISA menjadi tolok ukur penilaian mutu pendidikan di dunia berdasarkan kemampuan membaca, matematika, dan sains.

Dari data diatas dapat dilihat mutu pendidikan di Indonesia. Menanggapi hal tersebut pendidikan di Indonesia dapat bercermin dan melihat dan memodifikasi sistem sistem pendidikan di negara-negara maju salah satunya dengan melihat pengelolaan kurikulumnya. Pengelolaan kurikulum merupakan upaya atau metode kolaboratif untuk mencapai tujuan pembelajaran, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Pengelolaan kurikulum adalah tentang mengelola pengalaman belajar yang memerlukan strategi tertentu untuk menghasilkan pembelajaran yang produktif bagi peserta didik.

## **Metode**

Penelitian ini membahas terkait Kebijakan Pemerintah Terkait Pengelolaan Kurikulum Dalam Menciptakan Sekolah Unggul Jenis metode Tinjauan literatur digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan teori-teori penting yang sama atau linier dengan subjek yang sedang dibahas. Metode penelitian tinjauan literatur yang memberikan keluaran pengetahuan yang ada serta kesimpulan untuk digunakan dalam penelitian sebagai contoh untuk menghasilkan pembahasan yang jelas tentang isi masalah yang diteliti. Penulis mencari artikel atau jurnal untuk mencari bahan atau literatur untuk digunakan sebagai dasar yang kuat untuk memuat kedalam pembahasan. Dari penelitian ini, isinya berkaitan dengan penggunaan metode *systematic literature review*. Dengan menggunakan penelitian matematis, mencari dan mengumpulkan beberapa jurnal, diambil beberapa kesimpulan yang kemudian dibahas secara rinci. Untuk mencapai hasil akhir yang baik dan diharapkan.

## **Pembahasan**

### **A. Pengertian Pengelolaan Kurikulum**

#### **1. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan berasal dari kata "Kelola" atau dengan istilah lainn dikenal dengan kata "Managemen" yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan. Maka disimpulkan bahwa Pengelolaan merupakan pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan.



## 2. Pengertian Kurikulum

Kurikulum berhubungan dengan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan termasuk kegiatan belajar mengajar.

## 3. Pengertian Pengelolaan Kurikulum

Pengelolaan kurikulum sebuah bentuk usaha atau cara bersama untuk mencapai tujuan pengajaran terkhususnya dalam usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Pengelolaan kurikulum berhubungan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Sedangkan manajemen kurikulum adalah suatu sistem atau cara dengan komponen-komponan yang saling berhubungan, meliputi: peserta didik, guru, bahan ajar, kurikulum, sarana prasarana serta strategi pembelajaran. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai.

## **B. Prinsip dan Fungsi Pengelolaan Kurikulum**

Prinsip-prinsip pengelolaan kurikulum mempertimbangkan kebijaksanaan pemerintah maupun Departemen Pendidikan Nasional yaitu UUSPN No. 20 tahun 2003, pedoman penyelenggaraan program, kebijaksanaan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, kebijaksanaan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), keputusan peraturan pendidikan yang berkaitan dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pengelolaan kurikulum ialah sebagai berikut:

1. Produktivitas : bagaimana peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sarana dalam pengelolaan kurikulum.
2. Demokratisas : untuk menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan pendidikan
3. Kooperatif : untuk memperoleh hasil yang diharapkan perlu adanya kerjasama yang positif dari pihak yang terlibat.
4. Efektivitas dan efisiensi : memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, waktu yang relative singkat.
5. Mengarahkan visi misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum.

Adapun beberapa fungsi dari pengelolaan kurikulum ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum.



2. Meningkatkan keadilan (quality) dan kesempatan pada peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal.
3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas kinerja pendidik dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya.
4. Meningkatkan efektivitas kinerja pendidik dan aktivitas peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif dan terpadu.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kurikulum.

### **Komponen dan tahapan pengelolaan kurikulum**

Pengelolaan kurikulum melibatkan serangkaian komponen dan tahapan untuk merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memperbarui kurikulum secara efektif. Berikut adalah komponen dan tahapan yang umumnya terlibat dalam pengelolaan kurikulum:

1. Kebijakan Kurikulum: Merupakan landasan yang mengatur perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum di tingkat lembaga atau pemerintah.
2. Tim Pengelola Kurikulum: Tim yang bertanggung jawab atas perancangan, implementasi, evaluasi, dan pengembangan kurikulum.
3. Kurikulum Inti: Bagian dari kurikulum yang mencakup standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh semua siswa.
4. Kurikulum Tambahan: Materi dan kegiatan yang ditambahkan ke dalam kurikulum untuk memperkaya pengalaman belajar siswa.
5. Sumber Daya Kurikulum: Buku teks, materi pembelajaran, perangkat lunak, dan sumber daya lainnya yang mendukung pengajaran dan pembelajaran.
6. Evaluasi Kurikulum: Proses untuk menilai keefektifan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan.

### **Tahapan Pengelolaan Kurikulum**

1. Perencanaan: Identifikasi tujuan pendidikan, standar kompetensi, dan kebutuhan siswa. Tahap ini juga mencakup pengembangan struktur dan format kurikulum.
2. Pengembangan: Pembuatan kurikulum berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan, termasuk penentuan konten, metode pengajaran, dan penilaian.
3. Implementasi: Penyampaian kurikulum kepada siswa melalui pengajaran dan pembelajaran di kelas. Guru memainkan peran kunci dalam tahap ini.



4. Evaluasi: Penilaian terhadap efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi dapat dilakukan secara formatif (selama proses) dan sumatif (akhir).
5. Revisi dan Pembaruan: Berdasarkan hasil evaluasi, kurikulum direvisi untuk meningkatkan keefektifan dan relevansinya. Pembaruan juga bisa dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan baru dalam pendidikan.
6. Pengawasan dan Manajemen Berkelanjutan: Proses pengawasan terhadap implementasi kurikulum dan manajemen yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dan efektif dari waktu ke waktu. Setiap tahap dalam pengelolaan kurikulum memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, administrator sekolah, orang tua, dan komunitas pendidikan lainnya.

## **Menganalisis kurikulum, Silabus, RPP, Bahan ajar**

### **1. Analisis Kurikulum**

Analisis kurikulum tidak berdiri begitu saja, analisis kurikulum ini mempunyai ruang lingkup di dalamnya, agar terlaksananya analisis kurikulum yang baik. Ketika kita hendak menganalisis kurikulum kita harus mengetahui apa saja yang terdapat di dalam analisis kurikulum.

#### **a. Pengertian analisis kurikulum**

Kurikulum sudah tidak terlepas lagi dalam pendidikan. Sejarah sudah membuktikan perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Perubahan kurikulum itu terjadi karena hasil analisis yang dilakukan oleh pemangku kebijaksanaan yang ada.

Menurut Jogiyanto (1999:129) dalam jurnal Hanik Mujiati (2014) bahwasanya analisis adalah menguraikan suatu informasi dari beberapa komponen untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut untuk solusi yang diharapkan. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa analisis adalah proses identifikasi suatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau menemukan kekurangan dari keadaan yang sebenarnya sehingga dapat di temukan solusi yang di harapkan.

#### **b. Hasil analisis kurikulum**

Hasil dari analisis kurikulum adalah banyaknya perbandingan yang ada dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang saat ini dipakai. Selain itu dapat



diketahui juga komponen, serta tujuan kurikulum yang ada di Indonesia. Adanya analisis kurikulum ini dapat menjadi perbaikan dan menjadi referensi untuk pengembangan kurikulum berikutnya. Karena analisis kurikulum harus terus dilakukan agar adanya kemajuan dalam pendidikan di Indonesia.

## **2. Analisis silabus**

Silabus bermanfaat untuk pedoman dalam penyusunan RPP, guru juga harus mampu mengembangkan silabus secara mandiri dan setiap guru bertanggung jawab menyusun silabus setiap mata pembelajaran yang diampunya sesuai dengan SI, SKL, dan panduan penyusunan KTSP. Silabus juga memiliki komponen yaitu komponen silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar

## **3. Analisis RPP**

RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. (Depdiknas 2007). RPP paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang meliputi 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP diantaranya ada tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar

## **4. Analisis Bahan Ajar**

Bahan ajar adalah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan merupakan salah satu bagian dari sumber ajar yang dapat diartikan sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran yang baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran

Dengan ini, kurikulum memberikan pandangan luas tentang rencana pembelajaran secara keseluruhan, sementara silabus memberikan detail spesifik tentang rencana pembelajaran untuk satu kursus atau mata pelajaran. RPP adalah implementasi dari silabus di kelas, sementara bahan ajar adalah materi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mendukung tujuan pembelajaran.

## **C. Kebijakan Pemerintah Terkait Pengelolaan Kurikulum**

Berkaitan dengan pengelolaan kurikulum, bidang pendidikan termasuk didalam urusan pemerintahan yang konkuren. Hal tersebut berarti bahwa, kewenangan mengenai urusan di bidang pendidikan dibagi antara kewenangan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, adanya ketentuan tersebut tentunya harus diselenggarakan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip



akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan nasional terutama jalannya pelaksanaan pendidikan yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **1. Pendanaan Kurikulum**

Pendidikan merupakan sarana agar dapat menghantar pembentukan sumber daya manusia yang unggul dan dapat bersaing dalam mengisi tuntutan zaman. Secara teoritis dari argumentasi ini yaitu human capital theory. Argumentasi ini sudah menjadi lazim di kalangan dunia pendidikan dan negara untuk pembangunan jangka panjang dan jangka menengah yakni investasi pada manusia akan meningkatkan kompetensinya, sehingga memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi, pembenahan sistem sosial dan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan tujuan negara dan ideologi pendidikan yang dianut.<sup>9</sup> Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 47 Ayat (1) dan (2)). Mengenai pengalokasian dana pendidikan, Pasal 49 Ayat 1, 2, 3, dan 4 menjelaskan, (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari landasan konstitusional undang-undang dasar 1945 dan undang-undang sistem pendidikan sudah sangat tegas dan jelas bagi pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya untuk menyusun dalam bentuk anggaran pendidikan, terutama dalam penerapan kurikulum merdeka. Untuk itu pemerintah daerah dalam merancang dan mengawal kurikulum merdeka harus dengan perencanaan dan pemetaan yang sistematis dan komprehensif dari pemetaan kebutuhan sekolah, sumber daya manusia guru yang akan dilatih dan objek sosialisasi, pendanaan untuk sarana prasarana pendukung kegiatan pengembangan kurikulum merdeka.

## **2. Memfasilitasi adanya pendidik dan tenaga kependidikan untuk kurikulum**

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu (Pasal 41 Ayat (3)). Dalam pelaksanaannya kurikulum merdeka tidak dilaksanakan secara serentak dan masif, hal ini sesuai kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum, dari kebijakan ini dapat dipahami bahwa kurikulum merdeka bukan untuk dipaksakan namun sebuah pilihan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan globalisasi pendidikan.





### **3. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal**

Untuk kemajuan daerah sebagai pengembangan kearifan lokal yang sesuai dengan asas otonomi daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur urusan di daerah termasuk di dalamnya menetapkan arah pendidikan sebagai salah satu indikator dalam angka indeks pembangunan manusia (IPM). Secara jelas Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal (Pasal 50 Ayat (6). Pada Pasal 37 Ayat (1) huruf j menjelaskan, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: muatan lokal. Pengelolaan satuan pendidikan nonformal Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 52 Ayat (1).

Kearifan lokal atau kebijaksanaan lokal kurikulum sebagai upaya untuk menunjukkan kekhasan yang menjadi pandangan dan cara hidup masyarakat di suatu daerah tertentu. sehingga kearifan lokal atau kekayaan yang ada di daerah merupakan suatu kekayaan lokal yang berkaitan dengan pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan berdasarkan tradisi yang berlaku pada suatu daerah. Kearifan lokal tidak berupa norma dan nilai-nilai budaya saja, melainkan juga seluruh unsur gagasan. Selanjutnya merujuk dari dirumuskan dalam bentuk RPJP Nasional/Daerah Rencana pembangunan jangka menengah yang disusun oleh pemerintah pusat/ daerah, disebut rencana pembangunan jangka menengah tingkat pusat/daerah yang disingkat menjadi RPJM Nasional/RPJM Daerah. Dalam pasal 5 (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa: RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. Dari alur perencanaan dan konsep pembangunan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, maka sangat berpeluang membuat kerangka konsep dan kebijakan arah kurikulum yang adpat mengakomodir dan mengembangkan potensi sumberdaya lokal sehingga dari konsep kurikulum yang berbasis lokal dalam kurikulum merdeka dapat mengembangkan dan meningkatkan kemajuan khas daerah.

### **4. Kebijakan Guru Untuk Menerapkan Kurikulum**

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 44 Ayat (1) dan (3). Implementasi kurikulum memerlukan seseorang yang berperan sebagai pelaksananya. Guru merupakan faktor penting dalam implementasi kurikulum karena ia merupakan pelaksana kurikulum. Karena itu guru dituntut memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya karena tanpa itu kurikulum tidak akan bermakna sebagai alat pendidikan. Dan sebaliknya pembelajaran tidak akan efektif tanpa kurikulum



sebagai pedoman. Sebagai pelaksana kurikulum ujung tombaknya adalah guru dengan demikian guru menempati peran dalam pengembangan kurikulum.

### **Permasalahan Pengelolaan Kurikulum**

Permasalahan pengelola Kurikulum di Indonesia begitu banyak masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran yang dialami Indonesia. Masalah-masalah ini turut andil dalam dampaknya terhadap pembelajaran dan pendidikan Indonesia.

1. Pada guru: guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum disebabkan beberapa hal yaitu kurang waktu, kurang sesuaian pendapat, baik dengan sesama guru maupun kepala sekolah dan administrator karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri.
2. Dari masyarakat: untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan ataupun kurikulum yang sedang berjalan. Masyarakat adalah sumber input dari sekolah.
3. Masalah biaya: untuk pengembangan kurikulum apalagi untuk kegiatan eksperimen baik metode isi atau sistem secara keseluruhan membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit.
4. Kepala sekolah : dalam hal ini seharusnya kepala sekolah mempunyai latar belakang mendalam tentang teori dan praktek kurikulum. Kepala sekolah merupakan peranan yang penting dalam pengembangan kurikulum.
5. Birokrasi : terdiri dari para inspeksi di Kanwil dan juga orang tua maupun tokoh-tokoh masyarakat. Kepala sekolah dan stafnya tidak dapat bekerja dalam kerangka patokan yang ditetapkan oleh Depdikbud.

Untuk mencapai tujuan dari pengembangan kurikulum, para pengembangan perlu memahami berbagai masalah dalam pengembangan kurikulum. Ada berbagai masalah dalam pengembangan kurikulum. Masalah-masalah yang dikaji dalam perkuliahan ini mencakup masalah baik secara khusus (para guru, masyarakat, kepala sekolah, biaya, dan birokrasi) maupun secara umum.

### **Kesimpulan**

Kurikulum merupakan perangkat program yang menyeluruh yang menggambarkan mutu pendidikan suatu negara sehingga mempunyai peranan strategis dalam pembangunan negara.



Maka, perlu melakukan upaya-upaya sistematis dan profesional untuk memanajemen kurikulum dalam bentuk yang dinamis dan terpadu, dengan mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sekalipun kurikulum berjalan dengan baik, maka harus dikontrol agar pelatihan mengalir sesuai tugas dan bidang masing-masing.

Kurikulum yang ada saat ini masih merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang berbasis kompetensi. Kurikulum pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kemajuan pendidikan suatu negara, mulai dari konsep hingga penerapan atau praktik. Karena mempunyai peranan dalam pelaksanaan pedoman pendidikan yang baik seperti perencanaan dan pengorganisasian isi dan materi pembelajaran.

Pengelolaan kurikulum sebuah bentuk usaha atau cara bersama untuk mencapai tujuan pengajaran terkhususnya dalam usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Pengelolaan kurikulum berhubungan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Tahapan pengelolaan kurikulum meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi, evaluasi, revisi dan pembaharuan serta pengawasan dan manajemen berkelanjutan.

### **Daftar Pustaka**

- Chaerunisa, F., Pebriyana, L., Agustin, S. P., & Yantoro, Y. (2023). Pengelola Kurikulum dan Sarana Prasarana sebagai Penunjang Keberhasilan Pembelajaran Siswa Sekolah Dasar. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 774–781.
- Dhomiri, A. (2023). Konsep Dasar dan Peranan serta Fungsi Kurikulum dalam Pendidikan. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 118–128.
- Herlyana, R., & Afriansyah, H. (2019). Kurikulum dan Manajemen Pembelajaran. Universitas Negeri Padang Indonesia, 1-15.
- Nurhasanah, A., Pribadi, R. A., & Nur, M. D. (2021). Analisis kurikulum 2013. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 7(02), 484-493.
- Susetyo, S. (2020). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 29–43.
- Tri Anggini, I., & Clara Riana Dea Suryani Retno Wulandari, A. (2022). Pengelolaan Kurikulum dan Pembelajaran. *Jurnal Multidisipliner KAPALAMADA*, 1(3), 398–405.



<https://azramedia->

[indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/Kapalamada/article/view/253/228](https://azramediaindonesia.com/index.php/Kapalamada/article/view/253/228)

Wikanengsih, W., Nofiyanti, N., Ismayani, M., & Permana, I. (2015). Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia (Studi terhadap RPP yang Disusun Guru Bahasa Indonesia Tingkat SMP di Kota Cimahi). *P2M STKIP Siliwangi*, 2(1), 106. <https://doi.org/10.22460/p2m.v2i1p106-119.170>